

PEMERINTAH
DAERAH
PURWAKARTA



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Taman pahlawan nomor 9 Purwakarta



HUMANIS ADAPTIF DEDIKATIF INKLUSIF RESPONSIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 berorientasi kepada Rencana Kinerja Dinas Sosial P3A Tahun 2024, Renstra Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 serta DPA Dinas Sosial P3A Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dan sasaran penjabaran misi kedua yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup” menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menentukan sasaran strategis tahun 2024 terdiri dari :

1. Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.
2. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada tahun anggaran 2024 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 sasaran, dengan 8 (delapan) indikator sasaran, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dari 8 indikator sasaran yang diukur pada Umumnya memenuhi target.

Secara keseluruhan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta pada Tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 10.546.929.095 atau 93% dari total anggaran yaitu sebesar Rp 11.352.061.049,- dengan kriteria sangat tinggi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Tahun 2024 telah selesai disusun.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh di semua sub bidang, namun hanya pada sub bidang yang menjadi skala prioritas. Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan keberhasilan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat serta instansi terkait. Segenap kritik, saran dan masukan dari semua pihak dengan semangat kerja sama dan kesatuan langkah, semoga menjadi pemicu untuk terus menerus memperbaiki Kinerja pada tahun berikutnya.

Purwakarta, 17 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta,



H. DIDISUARDI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19660525 198803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Gambaran Hukum	4
1.5 Aspek Strategis Organisasi	12
1.6 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Visi dan Misi	17
2.3 Sasaran Strategis.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Realisasi Anggaran.....	61
3.3 Penghargaan / Prestasi	68
BAB IV PENUTUP	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan telah disahkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan kondisi aturan dan dasar hukum terbaru sehingga menjadi dasar untuk menyelaraskan program dan kegiatan serta menyelaraskan target capaian. RPD merupakan bahan acuan untuk menentukan Rencana Strategis Kabupaten yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh semua OPD.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 . Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Diharapkan upaya tersebut mampu menurunkan stigma di masyarakat dan meningkatkan kemampuan PPKS untuk melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi prioritas

pembangunan tahun 2024-2026, dengan strategi meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memberikan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui sistem di luar panti atau berbasis masyarakat/komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya serta Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan (Pro Poor), Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mengacu kepada:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

1.4 Gambaran Hukum

A. Kedudukan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, diduduki oleh Perencana Ahli Muda;
 - b. Sub Bagian Keuangan, diduduki oleh Kasubag Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum diduduki oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda.
3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
 - b. 2 (dua) Jabatan Fungsional Ahli Muda kosong;
 - c. Analis Mitigasi Bencana;
 - d. Pengelola Data Bantuan Sosial;
 - e. Pengadministrasi Anak Terlantar;
 - f. Analisis Masalah Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Analis Pelayanan Sosial.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Pekerja Sosial Ahli Muda;
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
 - c. 1 (satu) Jabatan Fungsional Ahli Muda Kosong.
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 2 orang;
 - b. 1 (satu) Jabatan Fungsional Ahli Muda kosong.

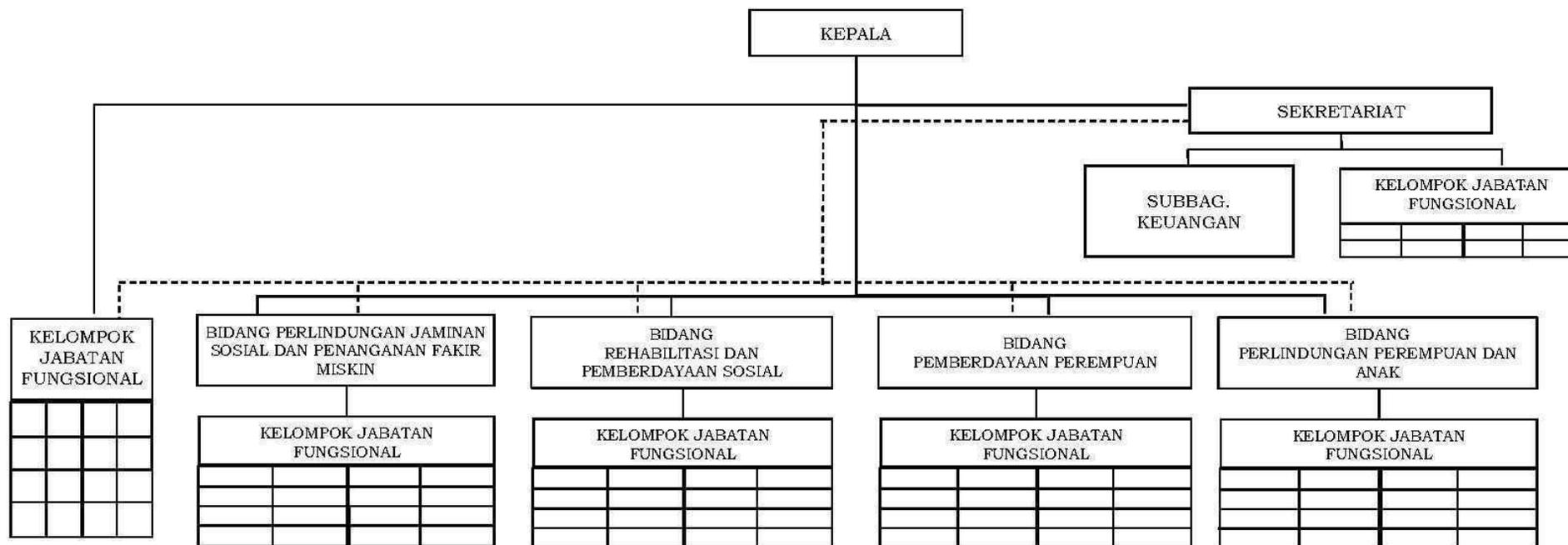
Adapun rincian tugas dari masing-masing jabatan dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan Dan Anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
 - c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin dengan rincian fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dengan rincian fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan yang meliputi kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan pembinaan organisasi perempuan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai rincian tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan, pelayanan, dan penguatan kelembagaan, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga dengan rincian fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi Kebijakan, program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta

D. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta didukung oleh sumber daya manusia baik ASN maupun Non ASN. Personil pendukung tersebut antara lain:

1. Pegawai ASN dan Non ASN

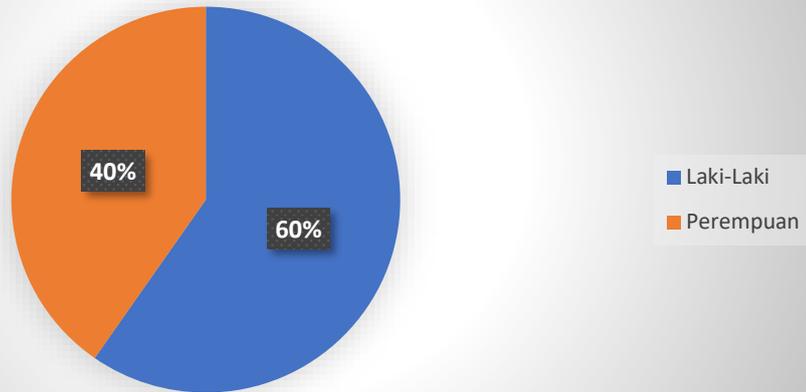
Jumlah pegawai ASN di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada Bulan Desember Tahun 2024 sebanyak 35 orang ASN dan 3 orang P3K, terdiri dari:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN
Pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
	Laki-Laki	Perempuan	
Kepala Dinas	1	-	1
Sekretariat	6	5	11
Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	5	4	9
Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	6	1	7
Bidang Pemberdayaan Perempuan	2	2	4
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2	2	4
Arsiparis Mahir	1	1	2
Non ASN	14	10	24
Total	37	25	62

Dengan rincian, pegawai laki-laki sejumlah 37 orang dan pegawai perempuan 25 orang, total keseluruhan 62 orang.

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Tenaga Pendukung Lainnya

Personil pendukung lainnya terdiri dari beberapa unsur atau kelompok antara lain :

Tabel 1.2
Tenaga Pendukung Sosial
Pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Tenaga Pendukung	Jumlah Orang/ Lembaga
Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)	70 Orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	18 Orang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	15 Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial	61 Lembaga
Administrator Pengampu Data (APD)	-
Karang Taruna Kabupaten, Kelurahan/Desa	209 Orang
Non ASN	24
Total	62

3. Keuangan

Perbandingan anggaran belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perbandingan Anggaran

No	Urusan/Bidang	Anggaran Tahun 2023 (Rp.)	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp.)
1.	Urusan Sosial	2.087.090.750	2.533.384.300	2.387.433.700
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.074.210.837	728.314.500	633.098.500
3.	Sekretariat	7.998.641.735	7.946.550.499	7.384.941.959
4.	Taman Makam Pahlawan (TMP)	183.110.350	143.811.750	141.454.936
Total Anggaran		11.343.053.672	11.352.061.049	10.546.929.095

Sesuai data tersebut diatas, bahwa pagu anggaran tahun 2023 terdapat kegiatan yang menjadi pembiayaan pada tahun 2024.

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari Aspek strategis dan isu-isu strategis, yang sangat perlu diperhatikan.

Adapun Aspek Strategis Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Sebagai berikut:

1. Aspek strategisnya penanganan fakir miskin adalah optimalisasi *ground checking* (pengecekan lapangan) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan instruksi dari pusat agar penerima bantuan sosial tepat sasaran.

2. Aspek strategis perlindungan sosial korban bencana alam/koordinasi dengan kementerian sosial untuk dibentuknya lumbung sosial dan kampung siaga bencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam/sosial di wilayah rentan bencana.
3. Akses dan Kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber daya, peluang pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain.
4. Penguatan Kebijakan Responsif Gender, merumuskan kebijakan yang secara aktif mempertimbangkan perbedaan gender dan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua sektor.
5. Analisis Gender untuk pertimbangan penyusunan kebijakan atau program tertentu.
6. Pengawasan dan Evaluasi: Menilai efektivitas kebijakan dan program pengarusutamaan gender, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mencapai tujuan kesetaraan dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Sedangkan isu-isu strategis, yang sangat perlu diperhatikan diantaranya adalah:

1. Tingginya angka Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum tersedianya Rumah Singgah/Shelter.
3. Belum tersedianya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
4. Belum terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tiap Desa.
5. Isu perempuan termarginalkan dari sektor lapangan kerja, politik atau dalam kepemilikan aset, pendidikan perempuan masih rendah.
6. Jumlah stunting perempuan meningkat.
7. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
8. Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
9. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pendataan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.
10. Kekerasan terhadap Perempuan dan anak meningkat.

Langkah-langkah yang dilaksanakan Dinas Sosial P3A adalah:

1. Mengintegrasikan data base PMKS/PPKS dan PSKS.
2. Mengusulkan pemindahtanganan aset untuk Shelter/Rumah Singgah.
3. Menciptakan keterpaduan program PMKS.
4. Meningkatkan partisipasi lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan PMKS.
5. Meningkatkan Partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak.
6. Mengadakan FGD dalam pembangunan berbasisi gender sampai tingkat desa.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sistematika yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang, dan maksud tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penjelasan umum organisasi serta isu-isu strategis yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang berisi renstra,renja, perjanjian kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kerja organisasi dengan berbagai analisa serta berisikan pula realisasi anggaran tahun tersebut.

BAB IV Penutup

Berisikan ringkasan dan kata kata penutup dari kepala perangkat daerah.

LAMPIRAN

Berisikan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan isi laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan rencana strategis Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan Sumber daya yang tersedia, dengan memuat substansi Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya di bidang PMKS lainnya dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan dan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 Visi dan Misi

Sasaran utama yang ingin dicapai dari perencanaan strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari tugas pokok, kewajiban dan fungsinya sebagai salah satu unsur pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, khususnya pada urusan pemerintah bidang sosial dan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Dengan demikian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mampu menjadi katalisator untuk dapat menggerakkan unsur-unsur teknis sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsi serta kewenangannya.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Purwakarta. Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang.

Visi Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah **“Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”**.

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Misi merupakan suatu kemauan yang kuat dari suatu lembaga organisasi dengan memperlihatkan kewenangan dan tanggung jawabnya atas kepentingan umum (publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebagai persyaratan terwujudnya Visi. Adapun misi yang telah disusun untuk mencapai visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dan KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut dijabarkan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk mewujudkan Misi Kedua yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup” . Maka visi dan misi yang sudah ditetapkan tersebut harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

2.3 Sasaran Strategis

Misi Pemerintah tersebut dijabarkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengacu pada Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”**.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta merumuskan tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapainya. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Tujuan dan sasaran dari misi kedua yang menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
Misi Kedua : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup						
1.	Meningkatkan Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100
2.	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	8.18	8.08	7.99
			Indeks Gini/ Ketimpangan Pangan	0.37	0.36	0.35
			Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	12.11	12.28	12.44
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.38	87.60	87.83
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79.92	80.93	81.94

3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi kedua yang menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta strategi dalam mencapai sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Program dan kegiatan yang dijalankan bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu. Adapun program-program dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Sosial.
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
4. Program Rehabilitasi Sosial.
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
6. Program Penanganan Bencana.
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
8. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
9. Program Perlindungan Perempuan.
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun.

Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi tersebut serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Untuk itu penyusunan perencanaan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan sasaran dan target yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2024, dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2024.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan perangkat daerah di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan tugasnya

pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintahan.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			
	Sasaran: Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100
2.	Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
	Sasaran: Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Angka kemiskinan	Persen	8.18
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Point	0.37
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rp.	12.11
	Sasaran: Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	87.38
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	79.92

3.	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel			
	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik

Selaras dengan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat dukungan anggaran terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 meliputi 12 Program sebagai berikut:

**Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	7.915.939.732
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial Terhadap PPKS	100	225.000.000
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Terfasilitasi	100	9.502.000

	Kekerasan			
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	577.851.500
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	100	1.539.304.500
6.	Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya Perlindungan dan Pelayanan Pasca Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100	203.981.500
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpenuhinya Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	100	193.226.619
8.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terpenuhinya Dukungan Terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	100	260.000.500
9.	Program Perlindungan Perempuan	Terpenuhinya Dukungan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100	226.218.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tercapainya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100	120.000.000
11.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Data Gender Anak	100	40.000.000
12.	Program	Terpenuhinya Pemenuhan Hak	100	120.750.000

	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Anak		
--	--------------------------	------	--	--

Total anggaran murni untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 anggaran adalah sebesar Rp.11.431.774.351,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai capaian kinerja digunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Tujuan: Meningkatkan Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana						
1.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	Sangat Tinggi	LPPD
2.	Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat						
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	8,18	8,41	102,8	Sangat Tinggi	BPS
		Indeks Gini/Ketimpangan Pendapatan	0,37	0,398	107,5	Sangat Tinggi	BPS
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	12,11	13.099	108%	Sangat Tinggi	BPS
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.38	86,94	99,49	Sangat Tinggi	Data final menunggu rilis

	Perempuan dan Perlindungan Anak						dari BPS
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79.92	76,8	96,09	Sangat Tinggi	Data final menunggu rilis dari BPS
3.	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel						
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	A (83,80)	100	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Tahun 2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik (90,2)	100	Sangat Tinggi	Yanliksmart Kabupaten Purwakarta

Secara umum, capaian pada indikator kinerja Utama tahun 2024, terdapat beberapa indikator yang sudah mencapai target yaitu Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100%, Pengeluaran Perkapita Disesuaikan 13.099 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 diperoleh nilai 83,80 dengan predikat A (Memuaskan), Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai predikat Sangat Baik dengan nilai 90,2.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2023-2024:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial							
	Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan							
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,48	8.46	113,1	8.18	8,41	102,8
		Indeks Gini/ Ketimpangan	0,36	0,372	103,3	0.37	0,398	107,5
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	13,150	12.619	95,9	12.11	13.099	108,1
	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,18	86,94	96,40	87.38	86,94	99,49

	Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,46	76,8	99,1	79.92	76,8	96,09
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel							
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	A	B	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100	Baik	Sangat Baik	100

Sedangkan berdasarkan perbandingan tahun 2023 dengan 2024 menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja pada Pengeluaran Perkapita Disesuaikan dari 12.619 menjadi 13.099, Capaian SAKIP dari predikat B ke A dan Indeks Kepuasan Masyarakat dari predikat Baik ke Sangat Baik.

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategi
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir RPD (2026)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				
	Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan				
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	8,41	7.99	105,2
		2. Indeks Gini/ Ketimpangan	0,398	0.35	113,7
		3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	13.099	12.44	105,2
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,94	87.83	99,49
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,8	81.94	96,09
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel				
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (83,80)	B	100

	Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	100
--	--	-------------------------------	-------------	------	-----

Berdasarkan tabel di atas capaian Sasaran Strategi dan indikator kinerja tahun 2024 pada umumnya melampaui target akhir RPD tahun 2026.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten /Kota Lain
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten lain	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				
	Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100 (Capaian Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)	100
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan				
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	8,41	8,57	98,13
		2. Indeks Gini/ Ketimpangan	0,398	0,428 (Capaian Jabar sampai bulan September)	92,99
		3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	13.099	12.157	107,7
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,94		
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,8		

	Anak				
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel				
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A (Hasil Reviu Lakip Dinas Sosial Kabupaten Sumedang)	100
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik		

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial						
	Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	100	Keberhasilan: Adanya buffer stock yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang bersumber anggaran dari APBD Provinsi	Melakukan rekrutmen SDM relawan bencana yaitu TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

	dan Sosial	pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota				dan APBN serta adanya dukungan dari Lumbung Sosial yang bersumber anggaran dari APBN sehingga semua kebutuhan dasar korban bencana alam/sosial dapat terpenuhi. Kegagalan: waktu dalam pemenuhan kebutuhan dasar tidak langsung/segera karena kurangnya SDM dalam penyaluran bantuan kebutuhan dasar korban bencana alam/bencana sosial	dalam rangka menambah personil/sdm penanganan bencana serta koordinasi dengan Kemensos RI terkait dengan pembentukan KSB
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan						
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	8.18	8,41	102,8	Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta lebih tinggi dari target, walaupun capaiannya	Untuk mengurangi angka kemiskinan dilakukan optimalisasi pengelolaan data yg berkaitan dengan

						melebihi 100% tetapi terdapat penurunan. Seharusnya capaian lebih rendah dari target. artinya jumlah penduduk miskin sangat tinggi walaupun adanya penurunan angka kemiskinan dibandingkan Tahun 2023 ada di angka 8.46% (0,05%)	kemiskinan (DTKS, P3KE, Regsosek) serta meningkatkan kualitas SDM pengelola data, pendamping sosial, dan ASN pengelola data dalam rangka pengelolaan data dan pengentasan kemiskinan
		Indeks Gini/ Ketimpangan	0.37	0,398	107,5	Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Purwakarta melebihi target,walaupun capaiannya lebih dari 100% terjadi penurunan. Artinya ketimpangan di Kabupaten Purwakarta semakin besar. seharusnya capaiannya tidak melebihi target (seharusnya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah kuota atau volume penerima bantuan sosial pada masyarakat miskin rentan • Membantu masyarakat miskin menjangkau dan mengakses fasilitas

						<p>indeks Gini lebih rendah dari target).</p>	<p>pendidikan dan kesehatan dasar seperti pendataan dan verifikasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), memberikan pengarah dan validasi data agar terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerjasama dalam penanganan masalah sosial dengan instansi vertikal dan horizontal untuk memberikan intervensi sosial
--	--	--	--	--	--	---	---

							<p>lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	12.11	13.099	108,2	<p>Peningkatan pengeluaran perkapita di Kab. Purwakarta berdasarkan data dari BPS tahun 2023 yaitu 12.619 menjadi 13.099 di Tahun 2024, hal ini sejalan dengan tupoksi Dinas Sosial dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan</p>	<p>Untuk mempertahankan stabilisasi pengeluaran perkapita yang disesuaikan dan peningkatan IPM sesuai tupoksi Dinas Sosial P3A, maka diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi

					<p>kepada keluarga rentan miskin, miskin, dan fakir miskin melalui program perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial mendukung terlaksananya komponen indeks pembangunan manusia yaitu pengeluaran perkapita dengan menasar kelompok yang membutuhkan penanganan kemiskinan sehingga mendorong peningkatan pengeluaran perkapita. Hal ini dilaksanakan dalam bentuk Pengembangan ekonomi masyarakat, pengelolaan data fakir miskin yang tepat sasaran, perlindungan sosial terhadap</p>	<p>pelaksanaan pengelolaan data yang berkaitan dengan kemiskinan (DTKS, P3KE, dan Regsosek)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Data, Pendamping, dan ASN dalam rangka pengelolaan data dan pengentasan kemiskinan • Memaksimalkan kolaborasi dan konvergensi lintas sektor perangkat daerah dan instansi vertikal termasuk dunia usaha dan
--	--	--	--	--	---	--

						kelompok rentan termasuk korban bencana alam dan sosial termasuk bantuan sosial PKH, Sembako, PBI, dan bantuan logistik kebencanaan.	akademisi, serta membuat inovasi layanan guna mempermudah pelaksanaan layanan bagi masyarakat miskin dan fakir miskin.
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.38	86,94	99,49	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada daerah atau kelompok yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang terpinggirkan • Masih banyak perempuan yang mengalami kesenjangan gaji, kurangnya kesempatan berkarir, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang setara 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan agar mereka masuk ke dalam ranah teknologi dan pasar digital untuk membantu meningkatkan ekonomi. • Memastikan akses yang lebih baik bagi

					<p>dengan laki-laki. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak dan akses ke sumber daya ekonomi menjadi salah satu hambatan utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk (seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau perdagangan manusia) bisa sangat menghambat pencapaian kesetaraan gender. • Kurangnya infrastruktur yang mendukung perempuan dan difable seperti fasilitas kebersihan yang ramah perempuan, 	<p>perempuan terhadap pendidikan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya pengadaan infrastruktur yang responsif gender baik di lingkungan kantor atau lingkungan sekitar yang ramah gender • Evaluasi program secara berkala
--	--	--	--	--	--	--

						transportasi yang aman, dan layanan kesehatan reproduksi, dll.	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79.92	76,8	96,09	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender dalam masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. • Waktu dan energi yang terbatas menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk mencalonkan diri atau berpartisipasi dalam politik. • Perempuan masih sulit mendapatkan suara dalam pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan untuk perempuan • Menyediakan akses yang setara untuk perempuan dalam pengambilan Keputusan dengan sosialisasi Politik, Hukum, Ekonomi

						karena beberapa kondisi yang masih menerapkan sistem patriarki	
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel						
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	A	100	Tertib administrasi dalam pemenuhan dokumen kelengkapan SAKIP	Meningkatkan kualitas isi dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	100	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan sebagai hasil dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan terhadap layanan-layanan yang sebelumnya mendapat penilaian kurang baik	Perbaikan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyempurnaan prosedur pelayanan, serta peningkatan efisiensi dalam penyelesaian layanan, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat

Adapun faktor keberhasilan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam Penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dukungan partisipasi *stakeholder* dalam penanganan PMKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hambatan yang didapatkan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan pelayanan terhadap PMKS/PPKS dan PSKS, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Solusi yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan *database* PMKS/PPKS dan PSKS.
2. Mengusulkan pemindahtanganan aset untuk Shelter/Rumah Singgah.
3. Menciptakan keterpaduan program PMKS.
4. Meningkatkan partisipasi lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan PMKS.
5. Meningkatkan Partisipasi gender dalam pembangunan dan perlindungan Anak
6. Mengadakan FGD dalam pembangunan berbasisi gender sampai tingkat desa

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Dan Kegiatan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial						
	Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Menunjang karena bagian dari SPM (Standar Pelayanan Minimal)
			1088 orang		Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota	1088	

					yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan						
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	8,41	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	93,15	Menunjang	
	2. Indeks Gini/ Ketimpangan	0,398					
	3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	13.099		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina			

				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	0	Tidak menunjang
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	78,50	Menunjang
					Jumlah warga	129	

					negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
					Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	39	
					Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar	88	

					panti		
					Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	25	
					Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	
					Persentase PMKS yang tertangani	100	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang dibina	0	Tidak menunjang

					Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	100	Menunjang Karena program tersebut mendukung upaya dan solusi dalam rangka stabilisasi pengeluaran perkapita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Kab. Purwakarta dengan menyoar kelompok rentan miskin, miskin, dan fakir miskin sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial P3A Kab. Purwakarta melalui
--	--	--	--	--	--	-----	---

							strategi penanganan kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan mengurangi beban pengeluaran dengan cara pemberian perlindungan sosial dan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	86,94 76,8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	72,50	Menunjang	
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	59		
			Program Perlindungan	Rasio kekerasan terhadap	98,91	Menunjang	

				Perempuan	perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	197	
					Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan	90	

				sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	82,89	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Data Gender Anak	93,58	Menunjang
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	99,40	Menunjang

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel							
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (83,80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	93,03	Menunjang	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	98	Menunjang	

Berdasarkan tabel diatas dari 12 Program yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 2 program yang menjadi nol pada anggaran perubahan yaitu:

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan kegiatan mengalami refocusing karena berdasarkan laporan tahun-tahun sebelumnya tidak ada kasus pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta.
2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada kegiatan pemeliharaan anak terlantar karena penanganan anak terlantar, kegiatan tersebut dinonaktifkan pada anggaran perubahan karena penanganan anak terlantar juga terdapat di program rehabilitasi sosial yang merupakan bagian dari SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tabel 3.8
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten
Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kabupaten/Kota			
		Indikator Kinerja		Target (%)	Sasaran	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2024	100	129	129	100
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti					
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2024	100	39	39	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti					
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2024	100	88	88	100
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya					

		di Luar Panti					
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2024	100	25	25	100
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti					
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2024	100	1088	1088	100
		Persentase (%) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian SPM
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Uraian SPM	Capaian 2023			Capaian 2024		
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Total Yang Terlayani	Capaian	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Total Yang Terlayani	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	41	41	100	129	129	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	46	46	100	39	39	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	40	40	100	88	88	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	40	40	100	25	25	100
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	807	807	100	1088	1088	100

Tabel 3.10
Data Penanganan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No.	Jenis	Jumlah Penanganan (Orang)	Keterangan (Populasi)
1.	Jumlah Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Kasus)		
	a. Anak Korban Pornografi	6	
	b. Anak Korban Kejahatan Seksual		
	1) Persetubuhan Terhadap Anak	14	
	2) Pencabulan Terhadap Anak	1	
	3) Pelecehan Seksual	29	
	c. Penganiayaan/Kekerasan Fisik Anak	5	
	d. Anak Korban Kekerasan Fisik/Psikis		
	1) Penganiayaan Terhadap Anak	5	
	2) Kekerasan Psikis	35	
	e. Anak Korban Penelantaran	1	
	f. Anak Berperilaku Sosial Menyimpang	16	
	g. Anak Korban Stigmatisasi Pelabelan	0	
	h. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	15	
	i. Anak korban Penyalahgunaan NAPZA	1	
2.	Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial PPKS		
	a. Anak Balita Terlantar	39	39
	b. Anak Terlantar	0	0
	c. Anak Berhadapan dengan Hukum	0	0
	d. Anak Jalanan	0	0
	e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	0	0
	f. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0	0
	g. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0

h. Lanjut Usia Terlantar	88	88
i. Penyandang Disabilitas	0	0
j. Tuna Susila	129	129
k. Gelandangan	25	25
l. Korban <i>Trafficking</i>	0	0
m. Korban Tindak Kekerasan	74	0
n. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)	0	0
o. Korban Bencana Alam	1053	1053
p. Korban Bencana Sosial	35	35
q. Fakir Miskin (Sumber Data DTKS) yang Dilayani KPM PKH, BPNT dan PBI APBN	465.260	497.406

Tabel 3.11
Penyaluran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No.	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Tahun 2023	Jumlah Penerima Tahun 2024
1.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	75.496 (Keluarga)	78.039 (Keluarga)
2.	Pendamping Keluarga Harapan (PKH)	27.594 (Keluarga)	32.315 (Keluarga)
3.	a. PBI APBN	349.033	354.906
	b. PBI APBD	91.590	92.527
4.	Bantuan Adaptif	-	-
5.	DTKS	202.974 (Keluarga)	204.650 (Keluarga)

Tabel 3.12
Rekapitulasi Bantuan Sosial
Tahun 2024

No.	Uraian Bantuan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran					Jumlah Sasaran	Jumlah yang dilayani
			APBN (Rp.)	APBD Provinsi (Rp.)	APBD Kabupaten (Rp.)	PSKKB (Rp.)	Lumbung Sosial (Rp.)		
1.	Penyediaan Permakanan	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	40	120
2.	Penyediaan Sandang	40.300.000	0	0	40.300.000	0	0	30	30
3.	Penyediaan Alat Bantu	187.813.000	0	0	187.813.000	0	0	29	17
4.	Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.697.500	0	0	2.697.500	0	0	30	17
5.	<i>Buffer Stock</i> Logistik Bencana Alam	762.474.045	0	110.838.145	120.250.500	184.211.400	317.174.000	0	0

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, besaran alokasi anggaran sebesar Rp. 11.352.061.049,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.546.929.095,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.946.550.499	7.384.941.959	92,93	561.608.540
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.528.600	150.335.000	99	2.193.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.268.053.619	5.780.049.913	92	488.003.706
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.508.400	3.503.400	100	5.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.429.900	56.234.400	100	195.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.468.904	244.836.534	97	7.632.370
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.459.000	148.420.000	100	39.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.178.076	665.258.812	92	54.919.264
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.924.000	336.303.900	98	8.620.100
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	245.880.800	229.030.700	93	16.850.100

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	245.880.800	229.030.700	93	16.850.100
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TIDAK KEKERASAN	0	0	0	0
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	-
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	583.289.000	457.885.500	78,50	125.403.500
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	547.889.000	440.255.500	80	107.633.500
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	35.400.000	17.630.000	50	17.770.000
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.500.233.000	1.497.590.000	99,82	2.643.000
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.500.233.000	1.497.590.000	100	2.643.000
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	203.981.500	202.927.500	99,48	1.054.000

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	141.750.500	141.078.500	100	672.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	62.231.000	61.849.000	99	382.000
7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	143.811.750	141.454.936	98	2.356.814
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	143.811.750	141.454.936	98	2.356.814
8.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	260.000.500	188.503.000	72,50	71.497.500
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.500	113.819.000	84	21.181.500
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	56.390.000	75	18.610.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	18.294.000	37	31.706.000
9.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	225.188.000	222.738.000	98,91	2.450.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	181.200.000	181.000.000	100	200.000

	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	43.988.000	41.738.000	95	2.250.000
10.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	117.000.000	96.983.500	82,89	20.016.500
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000	28.511.500	61	18.488.500
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	68.472.000	98	1.528.000
11.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.596.000	8.044.000	93,58	552.000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.596.000	8.044.000	94	552.000
12.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	117.530.000	116.830.000	99,40	700.000
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52.000.000	51.800.000	100	200.000

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.530.000	65.030.000	99	500.000
JUMLAH		11.352.061.049	10.546.929.095	93	805.131.954

Berdasarkan pagu anggaran perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebesar Rp 11.352.061.049 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.546.929.095 dimana realisasi anggaran sebesar 93%

Tabel 3.14
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian	
1.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial							
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	100	203.981.500	202.927.500	99	99
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan							
	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan				2.329.402.800	2.184.506.200	94	99,08

	Angka Kemiskinan	8.18	8,41	102,8				
	Indeks Gini/ Ketimpangan	0.37	0,398	107,5				
	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	12.11	13.099	108				
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				728.314.500	633.098.500	87	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.38						
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79.92						
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel							
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				8.090.362.249	7.526.396.895	93	99,06
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	A	100				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	100				

3.3 Penghargaan / Prestasi

Tabel. 3.16
Penghargaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

TINGKAT	JENIS PENGHARGAAN / PRESTASI	TAHUN PENGHARGAAN
NASIONAL	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	2024
NASIONAL	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024	2024
PROVINSI	Kategori Terbaik Tata Kelola Data Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	2024
KABUPATEN	Pegawai Berkinerja Terbaik Ke-1 (Satu) an. Muhammad Adli J.,S.Tr.Sos	2024

BAB IV

PENUTUP

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta merupakan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang sosial dan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2024 berdasarkan rencana strategis tahun 2024-2026. Laporan akuntabilitas kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mencapai target sesuai Penetapan Kinerja 2024.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang, sasaran atau program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program pada tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta menempuh berbagai langkah diantaranya:

1. Koordinasi dengan berbagai sektor terkait perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dalam pemenuhan logistik.
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Melakukan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap calon penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga apabila ada penanganan sosial maupun usulan dari Desa dipadankan dengan DTKS.
4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan layanan-layanan yang ada di Dinsos P3A

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwakarta, 17 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta,



ABDUL SUARDI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660525 198803 1 008

LAMPIRAN

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

- **SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BAGI PENDAMPING PKH DAN IPSM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 (JUM'AT, 29 NOVEMBER 2024)**



- **SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (23 Juli 2024)**



- **SOSIALISASI PUG BAGI PENEGAK HUKUM**
(JUM'AT, 13 SEPTEMBER 2024)



Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG



KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PUG DAN PPRG 2024

Kamis, 10 Oktober 2024



Dinas Sosial P3A bidang PP (Pemberdayaan Perempuan)

KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PUG DAN PPRG 2024

Senin, 14 Oktober 2024



Dinas Sosial P3A Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan)

KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PUG DAN PPRG 2024

Rabu, 16 Oktober 2024

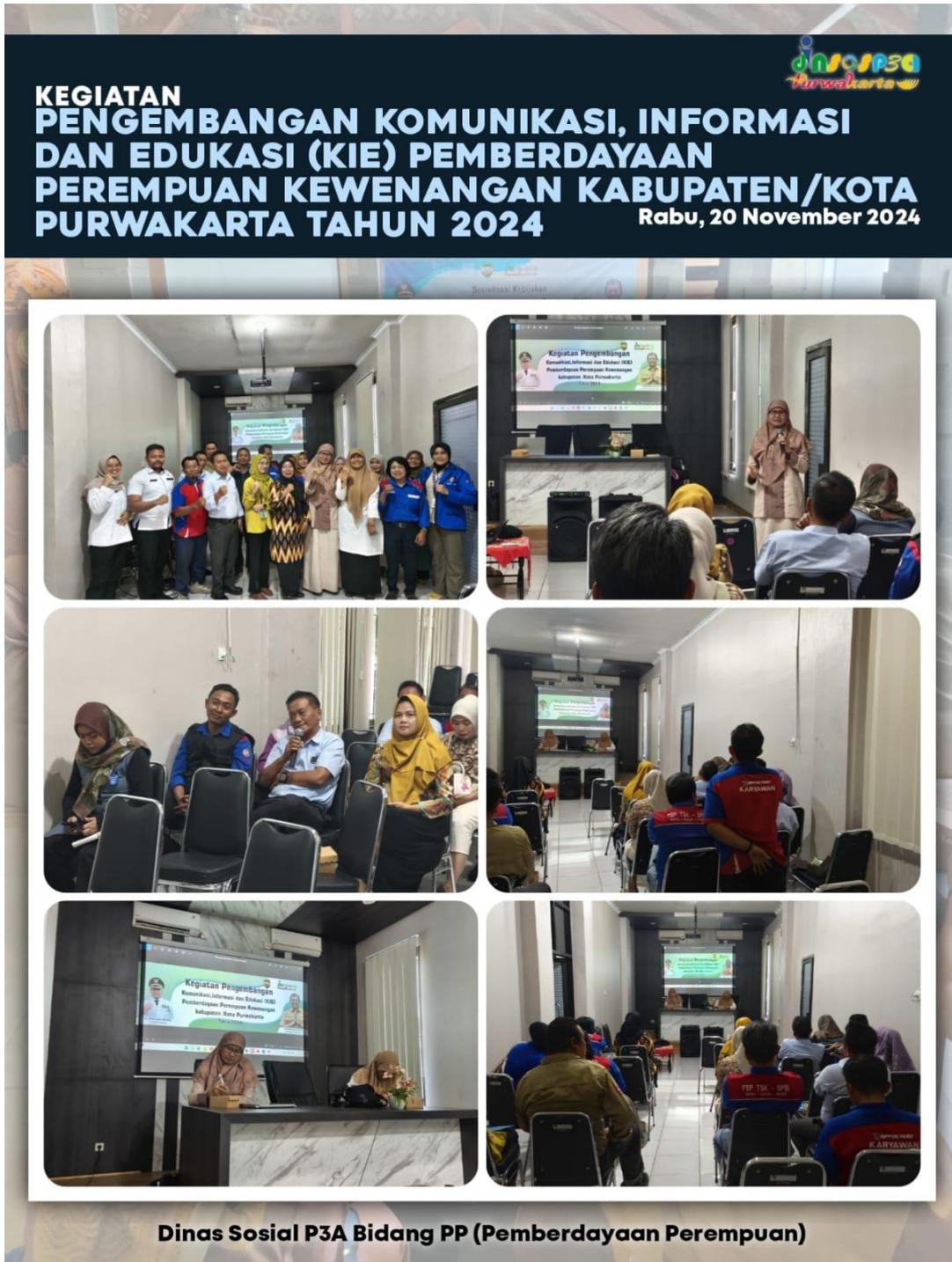


Dinas Sosial P3A Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan)

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi



Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



KEGIATAN SOSIALISASI PUG BAGI PERGURUAN TINGGI DAN GOW KABUPATEN PURWAKARTA

Kamis, 21 November 2024



Dinas Sosial P3A Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan)

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota



KEGIATAN PELATIHAN TRAINER WJWE CAANG TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN PURWAKARTA

Rabu, 04 Desember 2024



Dinas Sosial P3A Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan)

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- P2WKSS



- Kegiatan PEKKA (Perempuan Mendorong Ekosistem Konomi Lokal Berbasis Sumberdaya)



PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU
BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN
ANGGARAN 2024





DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERMAKINAN
BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN
ANGGARAN 2024
(TAHAP 1)



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG
BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN
ANGGARAN 2024





DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS DASAR PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN
ANGGARAN 2024





DOKUMENTASI KEGIATAN PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL



**DOKUMENTASI
SOSIALISASI AKREDITASI DAN PENERBITAN SURAT IZIN
OPERASIONAL YAYASAN / LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2024**



LAKIP Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

DOKUMENTASI KEGIATAN
STUDI TIRU TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) KE
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG
KAMIS, 5 SEPTEMBER 2024



DOKUMENTASI KEGIATAN
STUDI TIRU PUSKESOS SLRT KE DINAS SOSIAL KAB. GARUT





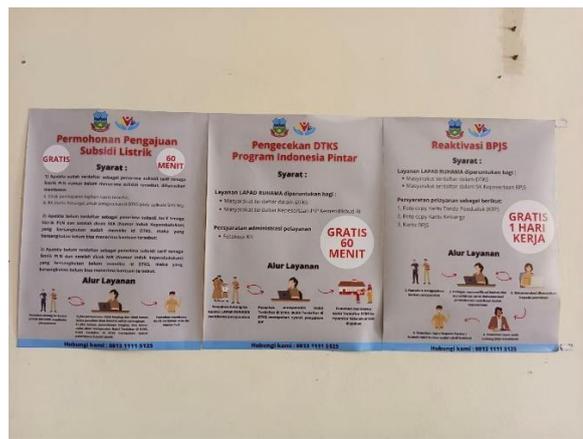
RUANG PELAYANAN



RUMAH SINGGAH



PETUNJUK INFORMASI



KEGIATAN PENANGANAN FAKIR MISKIN



MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN BANTUAN PERMAKAMAN LANSIA (POKMAS)



PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DTKS OPERATOR 17 DAN 175 LURING DAN DARING



KOORDINASI LINTAS SEKTOR BNI DAN PT. POS TERKAIT DATA SALUR BANSOS



KEGIATAN P2K2 DI KECAMATAN BABAKANCIKAO



RAPAT KOORDINASI PENDAMPING PKH DI KECAMATAN WANAYASA



MONITORING PENYALURAN BANSOS DI BNI PURWAKARTA YANG DILAKUKAN OLEH PENDAMPING PKH

KEGIATAN PENANGANAN FAKIR MISKIN



PENINGKATAN KAPASITAS DAN RAKOR PENGISI DATA SIKS- NG DESA/KEL SE-KAB. PURWAKARTA



PELATIHAN KETERAMPILAN DAN KEWIRAUUSAHAAN (KPM BERUSAHA) DI KEC. DARANGDAN



PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KPM BERUSAHA



WORKSHOP SOSIALISASI KEMPENSOS NO 73 THN 2024 DI KEC. DARANGDAN



MONEV KEGIATAN P2K2 KPM PKH KECAMATAN MANIIS



RAKOR PENDAMPING PKH

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL



PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA PARAKANSALAM KECAMATAN PONDOKSALAM



PENYALURAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DESA MARGASARI KECAMATAN PASAWAHAN



PENYALURAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DI DESA SUKAMUKTI KECAMATAN MANIIS KEPADA KELOMPOK RENTAN (LANSIA)



PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA RUMAH RUBUH KARENA ANGIN KENCANG DI DESA PLERED KECAMATAN PLERED

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL



PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA RUMAH RUBUH KARENA ANGIN DI DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN BOJONG



PENYALURAN BANTUAN KORBAN RUMAH RUBUH KARENA ANGIN DI DESA NAGRAK KEC. DARANGDAN



PENYALURAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DI DESA CIGELAM KECAMATAN BUNGURSARI



PENYALURAN BANTUAN KORBAN RUMAH RUBUH KARENA ANGIN KENCANG DI DESA GUNUNGHEJO KECAMATAN DARANGDAN

PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI DAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL



Kecamatan Tegalaru, Jawa Barat, Indonesia
Jalan Tegalwaru, Sukamulya, Kec. Tegalaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
41165, Indonesia
Lokasi: 61224511



Kecamatan Tegalaru, Jawa Barat, Indonesia
Jalan Tegalwaru, Sukamulya, Kec. Tegalaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
41165, Indonesia
Lokasi: 61224511



FASILITASI DAPUR UMUM PENGUNGSI KORBAN PERGESERAN TANAH
KEC. TEGALWARU (KOLABORASI KEMENSOS, TAGANA, DAN
STAKEHOLDER KEBENCANAAN LAINNYA)



KROSCEK BUFFER STOCK KEBUTUHAN
LOGISTIK PENGUNGSI



LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL / TRAUMA
HEALING KORBAN PERGESERAN TANAH
KOLABORASI DENGAN BID. PPA



MANAJEMEN PENGUNGSI (PELAYANAN
PRIORITAS BAGI KELOMPOK RENTAN)

KOORDINASI, SOSIALISASI, DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA



MONITORING DAN EVALUASI LUMBUNG SOSIAL KIARAPEDES, SUKATANI,
DARANGDAN, DAN SUKASARI



PENDAMPINGAN MONEV LUMBUNG SOSIAL DARI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENSOS RI

KOORDINASI, SOSIALISASI, DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA



RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI TAGANA



PELAKSANAAN ASESMEN TAGANA JABAR



APEL KESIAPSIAGAAN TAGANA SE JABAR DI
BUPERTA CIBUBUR



SINERGITAS TAGANA DENGAN PENGELOLA
LUMBUNG SOSIAL

PENYERAHAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN AHLI WARIS KORBAN BENCANA ALAM



Penyerahan santunan kematian ahli waris korban
bencana tanah longsor



Penyerahan santunan kematian ahli waris korban
bencana tertimpa pohon

PENYERAHAN BANTUAN KEARIFAN LOKAL KEPADA KELOMPOK USAHA RENGGANIS



PELAYANAN MASYARAKAT



PELAYANAN DI PUSLINJAMSOS DAN MADUKARA



MENGIKUTI KEGIATAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PADA KEGIATAN TMMD

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN



Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tema “Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Perkawinan Anak dan Stunting Melalui Pengasuhan Positif”, dengan peserta 30 orang, yang dihadiri oleh Kader Motekar, Perangkat Desa dan Lembaga Masyarakat, dinarasumberi oleh Konselor Psikolog P2TP2A Kabupaten Purwakarta, yang bertempat di Aula Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT B



- Kegiatan Rapat Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan dengan tema “Meningkatkan Kepedulian dan Peran Aktif Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dengan peserta 30 orang, yang dihadiri oleh Perangkat Kecamatan Cibatu, Perangkat Desa dan Ketua PAAREDI CEKAS Tk. Desa, dinarasumberi oleh Plt. Kepala Kesbangpol Kabupaten Purwakarta, yang bertempat di Aula Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.
- Honor rutin selama 12 bulan yang diberikan kepada Tim Unit PPA Polres Purwakarta (3 Orang).

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN HAK ANAK PADA LEMBAGA P



- Kegiatan rapat koordinasi APSAI, dengan peserta 35 orang, yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap perusahaan daerah Kabupaten Purwakarta, dinarasumberi oleh Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta, yang bertempat di Aula BAPPELITBANGDA Setda Kabupaten Purwakarta.

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN HAK ANAK PADA LEMBAGA P



- Kegiatan rapat koordinasi PUSPAGA untuk Menunjang KLA, dengan peserta 35 orang, yang dihadiri oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Purwakarta, TP. PKK per Kecamatan dan Kader Motekar,, dinarasumberi oleh Sekretaris DPPKB, yang bertempat di Aula DPPKB Kabupaten Purwakarta.

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN HAK ANAK PADA LEMBAGA P “RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS KLA”



- Kegiatan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA pada tahap evaluasi, dengan peserta 35 orang, yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap OPD Kabupaten Purwakarta, dinarasumberi oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) DP3AKB Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Aula Janaka Pemda Kabupaten Purwakarta.

PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS “CEGAH DAMPAK DIGITALISASI”



- Kegiatan *Capacity Building*, dengan peserta 50 orang, yang diikuti oleh Forum Anak Purwakarta, dinarasumberi oleh Konselor Psikolog P2TP2A Kabupaten Purwakarta dan Fasilitator Forum Anak Nasional Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Aleyra Hotel and Villa's Garut Kabupaten Garut.

